

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance* telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-

masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Kinerja pemerintah daerah adalah capaian capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan Kota Padang”**.

Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Padang yaitu Bagaimanan Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasisiwi Program diploma III fakultas ekonomi universitas andalas padang. Adapun tujuan yang dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III fakultas ekonomi universitas andalas
2. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara Dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang
4. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Sementara manfaat bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja
2. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja
3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.

Bagi Dinas Pendidikan Kota Padang adalah :

1. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis setelah kegiatan magang sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan Kota Padang.
2. Dapat mengetahui proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya didunia kerja.

4. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan studi.

#### **1.4 Sistematika Tugas Akhir**

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I**

##### **Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang dan manfaat magang, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II**

##### **Landasan Teori**

Pada bab ini terdiri dari pengertian laporan, pengertian akuntabilitas, pengertian kinerja, pengertian pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip LAKIP, manfaat LAKIP, fungsi LAKIP, tujuan LAKIP, pokok pembahasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, waktu penyampaian LAKIP, dasar hukum pemberlakuan LAKIP.

##### **BAB III**

##### **Gambaran Umum**

Pada bab ini terdiri tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan kota Padang, visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi unit organisasi Dinas Pendidikan kota Padang.



#### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

#### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

